**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) SERTA LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Sayyid Muhammad Iqbal Rahman

188040002

Konsentrasi Hukum Ekonomi

**Abstrak**

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagi bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang dipasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya, hadirlah electronic procurement yang selanjutnya disingkat sebagai e-procurement sebagai suatu sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan e-procurement, proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi praktik curang dalam lelang pengadaan barang dan jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

Kata Kunci : Pengadaan Barang Dan Jasa, E-Procurement, Tanggung Jawab Lembaga

**Abstract**

In organizing the national life, the government is required to participate in promoting the general welfare of social justice for all Indonesian people. For achieving this, the government is obliged to provide for the needs of the people in terms of goods, services, and infrastructure development. The procurement of goods and services are starting from the purchase/sale process of goods in the market (cash), then the progress towards purchasing a payment term, by making accountability documents from (buyer and seller) and finally through the procurement auction process. The goods and services procurement is essentially an effort by the user to realize the goods and services that he wants by using certain methods and processes in order to reach an agreement in terms of price, time and others.

There is an electronic procurement, which abbreviated as e-procurement, as an auction system in the process of procuring goods and services by the government that using the internet-based technology, information and communication facilities. With e-procurement, the auction process could take place in an effective, efficient, open, competitive, transparent, fair and accountable so that it is expected to reflect the transparency and also minimize fraudulent practices in the auction of goods and services procurement that result in harming national finances.

Keywords: E-Procurement,Goods and services procurement, Institutional responsibilities

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta 2009

Ade Maman Suherman, *Pengadaan Barang Dan Jasa (Government Procurement) perspektif kompetisi, kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan dan Internasiona,* Rajawali Pers, Depok 2017

Adrianto, Nico, *Good Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-governance*, Banyumedia Publishing, Malang 2007

Amirudin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta 2010

Busyara Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta 2011

Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Totalmedia, Bandung 2013

Hermawan, *Peluang Usaha Di Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa,* Media Indonesia 2010

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,* Malang 2005

Maria Farida Indriati , Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Jakarta 1998

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1999

Much Nurachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,* Transmedia Perkasa, Jakarta 2011

Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1994

Nico Adrianto, *Good Governance : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance,* Banyumedia Publishing, Malang 2007

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2014

Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta 2000

Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta 2017

Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa Dan Nusa Media, Bandung 2006

Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, CV Budi Utama, Yogyakarta 2015

Soedarmayani, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah:Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung 2003

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Remadja Karya, Jakarta 1985

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta 2001

Somardi, *Teori Umum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BBE Media Indonesia, Jakarta 2007

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung 1982

Witanto, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah),* CV Mandar Maju, Bandung 2012

**B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penyedia.

**C. Sumber Lain**

Hasil Penelitian Indonesia Procurement Watch Tahun 2010

Kemitraan Dan LPSE Nasional, E-Procurement Di Indonesia : Pengembangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Tahun 2008

Wawancara dengan Deden Ketua Pokja (Tugas Kelompok Kerja) Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 1 Oktober 2020

Edmon Makarim, Tanggung Jawab Penyelengara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dala, Penyelenggaraan Sistem Elektronik (good governance), Disertai

Teo, T.S., Lin & Lai, K., *Adopters and Non- Adopters Of E-procurement in Singapore*, An Empirical Study Omega, Singapore, 2009

Yohanes Sogar Simamora, *“Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah”* Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Baiq Dewi Yustisia, *Pengadaan Barang Oleh Pemerintah Melalui E-Procurement*

Hemat Dwi Nuryanto, *Pentingnya Audit dan Standardisasi E-Procurement*. Dalam Harian PikiranRakyat

[www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

[www.kemeperin.go.id](http://www.kemeperin.go.id)

[*http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=480*](http://forum.pengadaan.org/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=480)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah>

LKPP, [*http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499*](http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499)

<http://www.m.bisnis.com>

<http://www.lkpp.go.id>

[*http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5*](http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5)

<http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=847454599>